



**PERAN KEJAKSAAN DALAM KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL
PELAKU *ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING*)**

TESIS

INES RACHMAWATI PAILALAH

1720622093

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Ines Rachmawati Pailalah
NIM : 1720622093
Tanggal : Juli 2021

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Juli 2021
Yang Menyatakan



Ines Rachmawati Pailalah

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ines Rachmawati Pailalah

NRP : 1720622093

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERAN KEJAKSAAN DALAM KEBIJAKAN PENENGGELAMAN
KAPAL PELAKU *ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED*
*FISHING***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas royalti ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal :

Yang Menyatakan,



Ines Rachmawati Pailalah

PENGESAHAN

Tesis di ajukan oleh :

Nama : Ines Rachmawati Pailalah

NRP : 1720622093

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Peran Kejaksaan Dalam Kebijakan Peneggelaman Kapal
Pelaku Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan di terima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Negeri Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Atik Winanti, SH., MH

Ketua Penguji

Prof. Agus Surono, SH., MH.

Penguji I

Dr. Alfitra, SH., MH

Penguji II/ Pembimbing



Dr. Abdul Halim, M.Ag

Dekan

Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 22 Juli 2021

ABSTRAK

Kekayaan alam Indonesia berupa perairan yang sangat luas hingga potensi didalamnya berupa kekayaan ekosistem perairan baik kekayaan flora maupun fauna didalamnya menimbulkan ancaman terjadinya tindak pidana *illegal fishing*. Penanggulangan kejahatan tersebut dilakukan melalui 2 (dua) upaya yakni upaya penal dan upaya non penal, yaitu. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dan Aplikasi, yakni melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Dengan payung hukum yang baru diharapkan terciptanya kordinasi yang kuat antar institusi yang memiliki kewenangan penegakan hukum diranah perikanan demi tercapainya cita-cita negara poros maritim dunia dan terciptanya perlindungan untuk ekosistem kekayan air Indonesia, serta perlindungan untuk nelayan-nelayan Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan untuk melindungi kawasan perairan Indonesia agar tidak di eksploitasi oleh nelayan negara lain karena kekayaan Indonesia harus di manfaatkan untuk seluruhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia memberikan negara lain karena kekayaan Indonesia harus di manfaatkan untuk seluruhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam aturan yang mengatur kewenangan diberikan kepada penyidik yaitu Kejaksaan, Kepolisian, TNI AL, Bakamla, Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penenggelaman/pembakaran kapal yang berbendera asing yang didasarkan atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Hasil penulisan ini menjelaskan bahwa Penenggelaman/pembakaran kapal berbendera asing oleh Penyidik didasarkan atas putusan inkrah pengadilan, ditujukan dalam rangka menjaga kedaulatan perairan Indonesia, serta bentuk perlindungan atas hak-hak nelayan Indonesia agar bisa secara maksimal memanfaatkan kekayaan perairan Indonesia tanpa gangguan nelayan asing serta potensi perikanan yang seharusnya dinikmati oleh para nelayan Indonesia tidak diambil oleh nelayan asing dengan cara *illegal fishing* maka dengan penegakan hukum melalui kebijakan penenggelaman/pembekaran kapal-kapal asing yang terbukti melakukan *illegal fishing* menjadi langkah yang tepat guna menunjukan supremasi kedualatan bangsa Indonesia atas wilayahnya dan kekayaan perairannya tidakan ini harus dilakukan untuk memeberikan rasa jera kepada para pelaku *illegal fishing* tentunya dengan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang cermat tegas dan terukur.

Kata Kunci : Jaksa; Penenggelaman Kapal, Pembakaran Kapal; *Illegal fishing*.

ABSTRACT

Indonesia's natural wealth in the form of very wide waters so that the potential in it in the form of a wealth of aquatic ecosystems, both the wealth of flora and fauna in it poses a threat of illegal fishing. The crime prevention is carried out through 2 (two) efforts, namely penal efforts and non-penal efforts, namely: With the enactment of Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, and other related laws and regulations. And Application, namely through the process of investigation, investigation, prosecution, and court. With the new legal umbrella, it is hoped that there will be strong coordination between institutions that have the authority to enforce law in the field of fisheries in order to achieve the ideals of the world maritime axis state and create protection for Indonesia's water rich ecosystems, as well as protection for Indonesian fishermen who depend on the fishery sector for their livelihood. to protect Indonesian waters from being exploited by fishermen from other countries because Indonesia's wealth must be fully utilized for the prosperity and welfare of the Indonesian people, giving other countries because Indonesia's wealth must be fully utilized for the prosperity and welfare of the Indonesian people. In the rules governing the authority given to investigators, namely Prosecutors, Police, Military, Bakamla, Ministry of Marine Affairs and Fisheries to sink/burn foreign-flagged vessels based on court decisions with permanent legal force as regulated in Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries. This research is a normative legal research with the Statute Approach, Case Approach and Conceptual Approach. The results of this paper explain that the sinking/burning of a foreign-flagged ship by investigators is based on a court decision, aimed at safeguarding the sovereignty of Indonesian waters.

Key Word : Jaksa; Ship sinking, Ship burning; Illegal fishing.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas dengan rahmat dan nikmat-Nya serta tak lupa penulis sampaikan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, untuk dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Program Magister di Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Tesis dengan judul **“PERAN KEJAKSAAN DALAM KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL PELAKU ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING”**.

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Program Magsiter pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta serta mencapai gelar Magister Hukum periode tahun 2021. Banyak permasalahan dan hambatan yang penulis alami dalam menyelesaikan tesis ini, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis mendedikasikan tesis ini untuk buah hati tercinta Awan Reinard Pratama dan Alm. Muhammad Atharrazka Putra yang telah menemani penulis selama berkuliah hingga menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Dr. H. Abdul Halim, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

4. Dr. Alifitra, SH., MH. Selaku Pembimbing yang telah membimbing Penulis dan memberikan saran dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
6. Kedua orangtua, Ayahanda Benny J. Hendra Pailalah dan Ibunda Ita Rindiawati yang tidak berhenti selalu mendoakan penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Suami saya Danny Ismailliandy Putra, yang senantiasa mendoakan disetiap sholatnya dan mendukung langkah istrinya dalam belajar dan bekerja.
8. Kepada rekan-rekan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan RI yang senantiasa memberikan pengertian kepada penulis dalam bekerja yang diselingi dengan tugas belajar.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2017 di Program Studi Hukum Program Magister, semoga kita sukses selalu;

Saya sangatlah menyadari bahwasanya penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan–kekurangannya, mengingat saya sebagai manusia yang masih jauh dari kebenaran dan kesempurnaan dan banyak sekali kelemahan. Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jakarta, Juli 2021

Penulis,

Ines Rachmawati Pailalah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	12
1.6. Metode Penelitian.....	17
1.7. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERIKANAN.....	22
2.1. Hukum Perikanan Internasional.....	23
2.2. Hukum Perikanan Nasional.....	39
2.3. Tindak Pidana Perikanan	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1. Jenis Penelitian.....	47
3.2. Sifat Penelitian	49
3.3. Pendekatan Penelitian	50
3.4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	52
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.6. Analisis Data	54
BAB IV KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL PELAKU <i>ILLEGAL, UNREPORTED, DAN UNREGULATED FISHING</i>	55
4.1. Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Praktik IUU <i>Fishing</i>	55
4.2. Peran Kejaksanaan Dalam Kebijakan Penenggelaman Kapal	68
BAB V KESIMPULAN.....	83

5.1. Kesimpulan	83
5.2. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85